

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN KARTU SANITASI DAN MODEL PELIBATAN ZAKAT DALAM LAYANAN SEDOT LUMPUR TINJA GRATIS DI KABUPATEN KARANGANYAR

Samsi¹, Widyantoro Yuliatmojo²

Universitas Surakarta, Surakarta, Indonesia^{1,2}

E-mail: samsidrs@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk yang cepat dan pesatnya pembangunan kawasan perumahan maupun industri di beberapa negara termasuk di Indonesia semakin menambah beban dan permasalahan limbah rumah tangga (domestic waste water). Karena setiap hari manusia menghasilkan limbah seperti lumpur tinja, limbah air kemih, dan air buangan limbah lainnya, yang berakibat pada pencemaran jasad hidup berbentuk bakteri, fungi, dan jamur bersifat patogenik dan penghasil racun, hal demikian sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan pemerintah dan pelibatan zakat dalam layanan sedot lumpur tinja gratis melalui model Kartu Sanitasi (KARSA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik analisis secara deskriptif berdasarkan data dan fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana APBD membantu masyarakat berpenghasilan rendah dan dana zakat membantu masjid, serta mampu mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dalam program KARSA. Melalui efektivitas kebijakan ini sudah berhasil satu langkah menuju Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. yaitu hadirnya sanitasi berkelanjutan untuk semua, sekaligus Kabupaten Karanganyar mendapat penghargaan dari pemerintah pusat berupa Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Award 2019.

Kata Kunci: *Model, sedot tinja gratis, zakat.*

ABSTRACT

The rapid population growth and the rapid development of residential and industrial areas in several countries, including Indonesia, are increasingly adding to the burden and problems of domestic waste water. Because every day humans produce waste such as sludge, urine waste and other wastewater, which results in contamination of living bodies in the form of bacteria, fungi, and fungi that are pathogenic and produce toxins, this is very dangerous for human survival. This study aims to analyze the effectiveness of government policies and the involvement

of zakat in free sludge suction services through the Sanitation Card (KARSA) model. This study uses a qualitative approach, with descriptive analysis techniques based on data and facts in the field. The results show that the APBD funds help low-income people and zakat funds help mosques, and are able to optimize the Fecal Sludge Treatment Plant (IPLT), in the KARSA program. Through the effectiveness of this policy, one step has succeeded towards the Sustainable Development Goals (SDGs) in 2030. namely the presence of sustainable sanitation for all, while Karanganyar Regency has received an award from the central government in the form of Drinking Water and Environmental Sanitation (AMPL) Award 2019.

Keywords: *Model, free fecal suction, zakat.*

PENDAHULUAN

Implementas kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan dengan UU No 32 tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan UU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa paradigma baru baik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun dalam membawa kesinambungan kepemimpinan di propinsi, kabupaten/kota, sehingga secara demokratis melalui otonomi daerah memberikan bukti kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 2015; Presiden Republik Indonesia, 1999). Melalui UU No 32 Tahun 2004 juga memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyusun struktur organisasi pemerintahan di daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2004).

Arah Kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah dirumuskan dalam Visi dan Misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2013-2018 khususnya bidang kesehatan gratis dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan melalui program AMPL dan sinergis dengan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Kabupaten Karanganyar yang telah sukses menyelesaikan program jambanisasi atau pilar stop buang air besar sembarangan (BABS) di dideklarasikan pada 12 Nopember 2017. Maka salah satu langkah lanjutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar di bidang kesehatan adalah penerapan kebijakan program lanjutun dari AMPL berupa layanan sedot lumpur tinja gratis melalui model Kartu Sanitasi (KARSA) bagi msyarakat berpenghasilan rendah dengan pelibatan dana zakat yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Karanganyar.

Data awal yang dihimpun menunjukkan bahwa pada akhir tahun

2017 jumlah 206.389 dari rumah tangga yang dipantau, melalui 17 Puskesmas se Kabupaten Karanganyar terdapat sebanyak 184.351 rumah tangga kategori sehat atau 89,32 persen, sedangkan prasarana jamban keluarga yang dipantau sejumlah 205.732 jamban/WC keluarga yang memenuhi syarat sejumlah 43.902 jamban/WC keluarga atau 21,54 persen dan untuk jamban komunal yang dipantau sejumlah 41 jamban/WC komunal yang memenuhi syarat sejumlah 37 jamban/WC kamunal, atau sebesar 90,02% (Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2017).

Berangkat dari berbagai kondisi sanitasi dan beberapa hal yang terkait permasalahan kesehatan lingkungan tersebut serta rumitnya melihat proses dan akses bantuan dari APBD bagi masyarakat pengelola jamban/WC komunal yang berbentuk yayasan maupun takmir masjid/mushola, diperlukan bentuk dan pola sinergitas kelembagaan dengan kebijakan program pemerintah dalam layanan sarana kesehatan khususnya layanan sedot tinja gratis bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah maupun bagi pengelola jamban/WC komunal, maka fokus penelitian ini adalah mendalami upaya mengatasi kesenjangan akses pelayanan antara Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan warga masyarakat dan pengelola jamban/WC komunal melalui penerapan kebijakan model KARSA dan pelibatan zakat dalam layanan sedot tinja gratis. Untuk memahami dan mendalami berbagai

upaya dalam mengatasi kesenjangan layanan sarana kesehatan tersebut, peneliti menggunakan teori dasar kajian konsep Efektivitas kebijakan dan konsep model pelibatan zakat dalam layanan sedot limpu tinja gratis.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana efektivitas kebijakan pemerintah dalam perguliran Kartu Sanitasi (KARSA) dengan fokus model pelibatan zakat dan optimalisasi IPLT yang telah ada sehingga ditemukan nilai kebaruan dalam layanan sedot tinja gratis di Kabupaten Karanganyar.

KAJIAN PUSTAKA

1. Kajian Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Pengertian kebijakan publik menurut pendapat Richard Rose dalam Darwin (1999:109) adalah rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan dan dibuat oleh badan serta pejabat Pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang itu sejak pertahanan, energi dan kesehatan sampai pendidikan dan kesejahteraan. Masih dalam hal kebijakan maka Weber (1968:215), memberikan pandangan terhadap otoritas pada masyarakat bersikap dan bertindak dalam melegitimasi didasari nilai-nilai tradisi yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan pada otoritas legal rasional, maka otoritas pemerintah yang diterima (legitimasi) masyarakat berdasarkan legal rasional yaitu “pada kepercayaan terhadap legalitas aturan- aturan yang

ditetapkan dan hak orang-orang yang diberi otoritas berdasarkan aturan-aturan itu untuk mengeluarkan perintah-perintah”. Berdasarkan argumentasi tersebut, bahwa seseorang yang mendapat dan melaksanakan otoritas secara absah didasarkan pada landasan-landasan yaitu peraturan perundang-undangan atau aturan lain yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Dalam memahami tentang efektivitas maka Steers dalam Tangkilisan (2005:141), mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu: a) Produktivitas kerja; b) Kemampuan adaptasi kerja; c) Kepuasan kerja; d) Kemampuan berlaba, dan e) Pencarian sumber daya.

2. Kajian Strategi Kebijakan Program KARSA

Strategi peluncuran KARSA dalam layanan sedot lumpur tinja gratis sebagai bagian dari strategi STBM meliputi 3 (tiga) komponen maupun satekholders/pemangku kepentingan yang saling mendukung satu dengan yang lain yaitu penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

Agar strategi program KARSA dapat berjalan efektif maka Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama Tim kelompok kerja (POKJA) KARSA mengadakan pemicians sebagaimana telah dirancang dan diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam: a) merencanakan perubahan perilaku; b)

memantau terjadinya perubahan perilaku, dan c) mengevaluasi hasil perubahan Perilaku (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

3. Kajian Pelibatan Zakat

Kondisi masyarakat Kabupaten Karanganyar, hasil penelitian awal menunjukkan bahwa, tingkat kemiskinan di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2016 sebesar 12,49 persen atau sejumlah atau 107.938 jiwa dari jumlah penduduk tahun 2016 sejumlah 864.198 jiwa (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, 2016). Dalam hal akses rumah tangga terhadap jamban sehat data tahun 2016 terdapat sebanyak 96,07 persen atau 251.197 Kepala Keluarga (KK) dan masih ada 3,03 persen atau sebesar 10.305 KK yang masih membuang tinja di tempat terbuka atau masih BABS. Sedangkan rumah yang belum ada jamban sehat sebanyak 25.515 rumah tangga, yang terdiri dari; keluarga tidak mampu 16.177 KK masih BABS dan dari keluarga mampu 9.338 KK. masih BABS. (Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, 2016).

Pada penelitian ini, maka yang dimaksud Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah BAZNAS Kabupaten Karanganyar yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan ketentuan yang baru tersebut BAZNAS dibentuk secara struktural dengan keputusan Bupati Karanganyar setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah dan BAZNAS Pusat, sesuai dengan ketentuan BAZNAS

Kabupaten di pimpin oleh enam pimpinan secara kolektif dengan ditunjuk seorang dari salah satunya pimpinan sebagai Ketua dan dibantu dengan unsur Sekretariat BAZNAS Kabupaten.

Upaya menggulirkan model KARSA dalam layanan sedot tinja ternyata mengalami suatu hambatan yaitu kesenjangan pelayanan antara pemerintah pemilik kebijakan program KARSA dengan pengelola jamban/WC komunal, maka guna mengatasi kesenjangan akses pelayanan dalam program KARSA, dibutuhkan sebuah wadah atau lembaga/institusi lokal yang dinilai mampu menjalankan peran tersebut untuk menjembatani kepentingan pemerintah dengan rakyatnya di satu sisi dan kepentingan rakyat dengan pemerintahnya. Dari sekian banyak institusi lokal beserta potensi dan karakteristiknya, menurut Etzioni (1982:3) organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan lebih unggul dan efektif dibandingkan institusi sosial lainnya karena memiliki karakteristik yang khas. Menurut Friedman dalam Taufiq, Kombaitan, dan Putro (2018:144). Kebijakan kinerja lembaga dimaksudkan sebagai upaya untuk menjembatani perbedaan pandangan (communication gap) antara pengetahuan teknis dari kinerja dengan pengetahuan lokal dari masyarakat. Seiring dengan era reformasi yang menuntut transparansi, akuntabilitas dan demokratis. Kinerja BAZNAS dalam pendistribusian zakat melalui program kerjanya terdapat salah satu

program yaitu “Karanganyar sehat”, dengan demikian BAZNAS melalui pengelolaan dana Zakat dan didukung oleh ketentuan hukum Islam yang bertumpu pada 8 asnaf serta dipolakan dalam 5 program BAZNAS yang meliputi a) Karanganyar Makmur; b) Karanganyar Cerdas; c) Karanganyar Sehat d) Karanganyar Taqwa, dan (5) Karanganyar Peduli. maka kinerja BAZNAS sebagai mediasi dalam menyalurkan dana untuk membantu program jambanisasi, telah memenuhi syariat, memenuhi prosedur dan menjadikan keharmonisan hubungan antara Muzakki, Mustahiq maupun Pemerintah.

3. Kajian Potensi Zakat

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa beberapa lembaga sosial pengelola distribusi zakat mampu mengembangkan potensi zakat. Penelitian Abdelbaki (2013) Zakat dapat menghilangkan kemiskinan di negara-negara muslim dan mencapai keadilan yang diinginkan dalam distribusi pendapatan serta berperan penting dalam memperbaiki kesehatan dan sanitasi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh zakat terhadap pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Bahrain. Penelitian yang dilakukan Noor, Rasool, Ali, dan Rahman (2015), bertujuan untuk mengukur kinerja multidimensional dari organisasi zakat. Dimensi tersebut meliputi input, proses, output dan outcome. Hasil penelitian yang dilakukan di dua Institusi Zakat di Malaysia ini menunjukkan bahwa

organisasi zakat melalui peningkatan kemampuan dapat memberikan manfaat yang lebih baik untuk peningkatan kualitas hidup. Beik dan Arsyianti (2016) menganalisis peran dan produktivitas program zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan mustahiq (penerima zakat) dari perspektif dimensi spiritual dan material. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa program zakat dari BAZIS dan Dompot Dhuafa DKI Jakarta memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi mustahiq, data hasil penelitian menunjukan tingkat spiritual mustahiq meningkat 13,09 persen, sedangkan indeks kesejahteraan meningkat 96,8 persen dan indeks kemiskinan mengalami penurunan 30,15%.

METODE

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Karanganyar. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan semua warga masyarakat Karanganyar yang mendapat sasaran gerakan pemicuan dan mendapat layanan KARSA baik secara peorangan maupun pengelola jamban/WC komunal dari dana Pemerintah dan dari pengelola zakat BAZNAS, dilaksanakan dari bulan Desember 2019 sampai bulan Mei 2020. Jenis dan sumber data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas kebijakan

Pada umumnya masyarakat dalam menerima kebijakan akan bersikap dan bertindak dalam melegitimasinya secara filosofis didasari nilai-nilai tradisi yang ada dan berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan pada otoritas legal rasional, secara teori. Melihat fenomena yang terjadi dalam kajian lapangan peneliti melihat kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar menggulirkan KARSA dalam layanan sedot lumpur tinja gratis dilandasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Pengelolaan Air Limbah Permukiman. Maka dalam merealisasikan landasan tersebut di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam menguatkan strategi lebih lanjut di Tetapkan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh bagi Karanganyar (Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 2016). Masih dalam rangka proses kebijakan dan sebagai operasional kegiatan yang secara nyata maka Bupati Karanganyar menerbitkan beberapa Surat Keputusan Tentang Penetapan Penerima Layanan Sedot Tinja Gratis melalui dua tahapan. Yang secara riil dapat tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Data Penerimaan Layanan Sedot Tinja Gratis Kabupaten Karanganyar Tahun 2018/2019

No	Dasar	Sasaran Penerima	Lokasi	Jumlah
1	Surat Keputusan Nomor 660.1/332 Th.2018 Tentang Penetapan Penerima Layanan Sedot Tinja Gratis Tahap I Th.2018 Tanggal 9 Februari 2018	a) Penerima bantuan stimulan jamban sehat sederhana Th. 2014 dan Th. 2015.	Kec. Karanganyar Kec. Tasikmadu Kec. Jaten dan Kec Kebakkramat	287 kepala keluarga (APBD 2018)
		b) Keluarga miskin yang berada di luar desa lokasi tersebut	Kec. Karanganyar Kec. Tasikmadu Kec. Jaten dan Kec Kebakkramat	1.713 kepala keluarga (APBD 2018)
2	Surat Keputusan Nomor 660.1/488 Th.2018 Tentang Penetapan Penerima Layanan Sedot Tinja Gratis Tahap I Th.2019 Tanggal 7 Februari 2019	Pemilik jamban dari keluarga miskin	Kec. Karanganyar Kec. Tasikmadu Kec. Jaten dan Kec Kebakkramat	1.130 kepala keluarga (APBD 2019)
3	Surat Keputusan Nomor 660.1/994 Th.2018 Tentang Penetapan Penerima Layanan Sedot Tinja Gratis Tahap II Th.2019 Tanggal 23 Agustus 2019	Pemilik jamban dari keluarga miskin	Kec. Karanganyar Kec. Tasikmadu Kec. Jaten Kecamatan Mojogedang dan Kec Kebakkramat	870 kepala keluarga (APBD 2019)
4	Perjanjian Kerjasama antara BAZNAS dengan Pemerintah Kab. Karanganyar No.V Th. 2018 dan Nomor 415.4/16/PKS/X/2018 Tentang Pengelolaan Lumpur Tinja Tangki Septic Masjid	Pengelola jamban komunal masjid/musholla	Semua wilayah kecamatan se kabupaten karanganyar	Sesuai pengajuan pengelola jamban komunal masjid/musholla

Sumber:Dinas Lingkungan Hidup dan Sekretariat BAZNAS Kabupaten Karanganyar Juni 2020 diolah

Dari Tabel tersebut dapat dilihat bahwa sebagai konsekwensi dari terbitnya surat Keputusan Bupati tersebut maka dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Berlanja Daerah tahun 2019 dengan menetapkan beberapa warga dan jumlah masing-masing wilayah melau

3 surat keputusan khusus untuk bantuang sedot lumpur tinja masyarakat atau jamban/WC keluarga yang tidak mampu dengan program KARSA. Sedangkan untuk merealisasikan layanan sedot tinja gratis bagi Masjid/Mushola diterbitkan Perjanjian Kerjasama antara BAZNAS dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar No. V Tahun 2018 dan Nomor 415.4/16/PKS/X/2018 Tentang Poengelolaan Lumpur Tinja Tangki Septic Masjid. dengan bentuk KARSA "Voucher Sedot Tinja Masjid". Sebagai pengikatan komitmen maka penerima layanan sedot tinja gratis ini, dicatat sebagai Peserta Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) yang siap melakukan penyedotan mandiri/swadaya pada tahap berikutnya antara 3 tahun sampai 5 tahun berikutnya sesuai kondisi jamban kelurga masing-masing, hal ini disamping sebagai ikatan juga untuk membentuk kesadaran bersama atas pentingnya sanitasi berkelanjutan untuk semua. Efektivitas kebijakan KARSA sebagaimana dikemukakan Steers (1985:64), bahwa untuk mengukur efektivitas memiliki lima kriteria maka dalam perguliran kebijakan KARSA ini dapat dilihat bagaimana efektivitasnya melalui keberhasilan yang dicapai, sesuai hasil wawancara, dan pengkajian data di lapangan didapat hasil analisis sebagai berikut:

- a. Produktivitas kerja : sinergisitas Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan BAZNAS.
- b. Kemampuan adaptasi kerja: Kabupaten Karanganyar mampu

mewujudkan layanan sedot tinja jamban/WC Keluarga Target 4.000 dan Jamban/WC Komunal Target 200 jamban/WC kominal.

- c. Kepuasan kerja: Tercapainya Realisasi 100 persen 4.000 jamban/WC Keluarga dan realisasi dana Zakat 62 persen untuk 124 jamban/WC Masjid/Mushola.
- d. Kemampuan berlabar: Realisasi ABBD 2018 dan 2019 selesai 100 persen dana Zakat 2018 dan 2019 realisasi 62 persen
- e. Pencarian Sumber Daya: Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya Layanan Lumpur Tinja Terjadwal dan mendukung program sanitasi

berkelanjutan untuk semua, baik kepemilikan secara mandiri atau pengelola secara komunal Melalui pemahaman ini efektivitas kebijakan pemerintah bukan saja sekedar efektivitas dalam penerbitan/perguliran KARSA tetapi suatu kebijakan tersebut sudah beproses dan didukung oleh semua komponen atau stake holders serta diterima oleh masyarakat yang dilayani karena dalam prosesnya telah dilakukan sosialisasi tentang bahayanya penanganan limbah tinja yang tidak dilakukan penyedotan secara terjawal dan arti pentingnya sanitasi berkelanjutan untuk semua. Melalui proses dan tata kelola maka kebijakan tersebut bukan saja efektif bagi suksesnya suatu program, tetapi dapat dipahami secara filosofis kebijakan KARSA ada nilai legitimasi rasional

yang berproses dalam layanan sedot tinja gratis di Kabupaten Karanganyar

Model Pelibatan Zakat

Pelibatan zakat dalam program KARSA menjadi sangat penting dilakukan, karena disamping penetapan kebijakan sebagai alat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga dalam pelaksanaan dan pencapaian target sanitasi berkelanjutan untuk semua, perlu melibatkan komponen/lembaga yang mampu dan memiliki potensi. Sejalan dengan pendapat Etzioni (1982:3) organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan lebih unggul dan efektif dibandingkan institusi sosial lainnya karena memiliki karakteristik yang khas, Maka model pelibatan zakat dan kinerja BAZNAS dapat menjadi media yang dapat mengambil jalur tengah untuk mencapai keterpaduan antara program pemerintah dan program BAZNAS dalam layanan sedot lumpur tinja gratis. Secara filosofis maka pemahaman model pelibatan zakat yang dikelola BAZNAS dengan penerapan KARSA mampu berperan sebagai mediasi hubungan antara pemerintah, Muzakki (penyetor zakat) dan Mustahiq (penerima manfaat zakat). Fakta dilapangan menunjukkan bahwa dalam program KARSA ternyata mampu melayani sedot lumpur tinja gratis bagi jamban/WC komunal dimasjid dan mushola yang tidak memungkinkan dapat terjangkau oleh pemerintah melalui dana APBD.

Dengan demikian dari sisi BAZNAS sebagai organisasi/lembaga

sosial pengelola dan pendistribusian dana zakat, disamping menjadi motivasi dalam pengembangan potensi Zakat untuk kepentingan para muzaki dan mustahiq dalam mendukung program layanan sedot tinja gratis, juga bagi pemerintah pelibatan zakat ini difahami juga sebagai nilai mediasi hubungan, sehingga dapat diartikan sebagai “sama sama berbuat sesuatu” untuk zakat.

Optimalisasi IPLT

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar sebagai lembaga yang berfungsi melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan visi “Terwujudnya Lingkungan Hidup Karanganyar yang Bersih Sehat dan Lestari” melalui visi inilah, Dinas Lingkungan Hidup memiliki tanggung jawab dalam kebijakan tentang penanganan masalah lumpur tinja dan mengoptimalkan pengelolaan IPLT yang ada di Desa Kaliboto Kecamatan Mojogedang. Sesuai hasil penelitian dilapangan IPLT tersebut dalam satu kawasan memiliki beberapa spesifikasi bangunan sebagai berikut;

- a. Bak Penampung : 1 buah volume 25 m³ kapasitas timbunan 1,286 m³ per hari.
- b. Bak Anaerobik: 1 buah volume 1169 m³ Kapasitas 20 m³ per hari.
- c. Bak Matural: 1 buah bak volume 290 m³.
- d. Bak Fakultatif: 1 buah volume 1.169 m³ kapasitan 20 m³ per hari.
- e. Bak Indikator: berfungsi sebagai indicator influent IPLT sebelum

keluar ke badan air dengan dimensi 3 x 3 m.
 f. Bak Pegumpul lumpur: volume panjang 1.75 m, lebar 1.75 m dan kedalaman 2 m dengan free board 0,4 m.

Dalam kinerjanya Dinas Lingkungan hidup ingin melakukan optimalisasi pemanfaatan IPLT yang ada tetapi sebelum adanya program KARSA mengalami beberapa kendala, maka setelah digulirkan KARSA Dinas Lingkungan hidup mengimplementasikan program yang secara teknis dilakukan revitalisasi, optimalisasi dan penambahan infrastruktur yang berpola sebagaimana gambar di bawah. Dari kerangka implementasi dan optimalisasi IPLT tersebut dapat dilihat bahwa sebagai komitmen pemerintah Kabupaten

Karanganyar dalam perguliran KARSA diinspirasi dari sukses mendeklarasikan Stop BABS Nopember 2017. Maka kiprah Pemerintah dalam program KARSA terus bergulir, melalui beberapa kebijakan teknis dan prosedur penanganannya, dalam program ini pelibatan zakat yang dikelola BAZNAS mampu sebagai mediasi hubungan yang baik dalam layanan sedot tinja jamban/WC komunal di masjid dan di mushola, maka melalui program ini IPLT dapat berfungsi secara maksimal baik bagi kelangsungan pengelolaan maupun pemanfaatan hasil olahan limbah lumpur tinja yang bermanfaat bagi kebutuhan para petani disekitar IPLT, adapun hasil optimlisasi IPLT tersebut setelah adanya program KARSA dapat dilihat pada gambar dibawah:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Januari 2020

Gambar: Kerangka Implementasi dan Optimalisasi IPLT
 Upaya optimalisasi terus dilakukan melalui berbagai evaluasi dan hasilnya dapat meningkatkan volume pasokan lumpur tinja yang dikirim ke IPLT, hal tersebut dapat dilihat melalui Tabel 2 dibawah;

Melalui Tabel tersebut dapat dilihat perkembangan sebelum program KARSA dalam jangka 2 tahun IPLT hanya menerima 205 titik lumpur tinja dari yang di tangani oleh Dinas Lingkungan Hidup maupun dari pengelola sedot lumpur tinja swasta.

Tabel 2. Data Perkembangan Pemanfaatan IPLT Kalaiboto Kecamatan Mojogedang

No	Kegiatan Pemanfaatan IPLT	Sebelum Program Kartu Sanitasi (2016-2017)	Setelah Program Kartu Sanitasi (2018-2019)
1	Layanan yang dikelola/dipasok dari Mobil Septic Dinas Lingkungan Hidup	142 titik/jamban	163 titik/jamban
2	Layanan yang dikelola/dipasok dari Mobil Septic Swasta	63 titik/jamban	165 titik/jamban
3	Layanan Kartu Sanitasi jamban/WC keluarga	0 titik/jamban	4.000 titik/jamban
4	Layanan Kartu Sanitasi jamban/WC komunal(dana Zakat)	0 titik/jamban	124 titik/jamban

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangayar Juni 2020 (diolah)

Sedang setelah adanya program KARSAselama 2 tahun yaitu tahun 2018 dan 2019 telah melayani pengolahan sebanyak 4.452 titik lumpur tinja, sehingga terjadi kenaikan sebesar 2.172 persen setelah program KARSAs, baik yang dikelola Dinas Lingkungan hidup melalui 3 armada mobil truk sedot septic maupun melalui armada mobil truk sedot septic dari swasta yang melayani KARSAs maupun yang melayani masyarakat secara mandiri. Maka melalui program KARSAs ini disamping optimalisasi pemanfaat IPLT terwujud juga tingkat partisipasi

masyarakat untuk melakukan sedot lumpur tinja terjawab mulai terbangun, yang berimplikasi pula pada nilai pemanfaatan yang lebih besar bagi hasil olahan lumpur tinja IPLT unuk kepentingan para petani disekitarnya sebagai pupuk alami yang aman bagi tanaman. Begitu juga pola penyedotan lumpur tinja bagi pengelola swasta ada kesadaran untuk selalu mengirim ke IPLT mulai tumbuh dalam rangka membangun kebersamaan mewujudkan sanitasi berkelanjutan untuk semua di Kabupaten Karanganyar.

KESIMPULAN

Melalui konsep efektivitas kebijakan pemerintah dan pendekatan proses legitimasi kebijakan, yang dilakukan secara konsisten dan prosedural maka Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam perguliran KARSA ini mampu memperoleh dukungan dari semua stakeholders. sehingga disamping kebijakan ini berjalan efektif juga secara filosofis ada nilai legitimasi rasional yang mewujudkan kepuasan kerja bagi pemerintah dan semua stakeholders termasuk masyarakat penerima layanan untuk bersama sama memaknai arti penting dan manfaatnya program KARSA.

Model pelibatan zakat dalam layanan sedot lumpur tinja gratis dengan konsep pendekatan kesenjangan pelayanan antara pemerintah dan pengelola jamban/WC kominal, maka model pelibatan zakat menjadikan BAZNAS berperan sebagai mediasi hubungan yang memunculkan keharmonisan hubungan dalam layanan

KARSA sehingga secara filosofis melalui model ini ada nilai “sama sama berbuat sesuatu” untuk zakat, peran BAZNAS disamping menjadi motivasi dalam pengembangan potensi Zakat, juga untuk kepentingan para muzaki dan mustahiq serta bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam kontribusinya terhadap program nasional dan program SDGs, yaitu hadirnya sanitasi berkelanjutan untuk semua, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan KARSA dapat berjalan efektif dan diterima masyarakat sehingga terjadi peningkatan volume pasokan di IPLT setelah program KARSA sebesar 2.172 persen dalam kurun waktu 2 tahun, Maka melalui kebijakan KARSA, disamping optimalisasi IPLT cukup berhasil, juga ada nilai tambah bagi masyarakat petani disekitarnya untuk memperoleh hasil olahan lumpur tinja bagi pupuk tanaman dan berimplikasi pada peningkatan hasil pertanian atas program KARSA dan optimisasi IPLT di Kaliboto.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdelbaki, H. H. (2013). *The Impact of Zakat on Poverty and Income Inequality in Bahrain. Review of Integrative Business and Economics Research*, 2(1), 133–154.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar. (2016). *Karanganyar Dalam Angka 2016*. Karanganyar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). *Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160.
- Darwin, M. (1999). *Implementasi Kebijakan, Modul Pelatihan*

- Teknik, dan Manajemen Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. (2017). *Buku Profil Kesehatan Kabupaten Karanganyar 2017*. Karanganyar: Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
- Etzioni, A. (1982). *Organisasi-Organisasi Modern (Suryatim, Ed.)*. Jakarta: Kerjasama Universitas Indonesia dan Pustaka Bradjaguna.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. , (2014). Indonesia.
- Noor, A. H. M., Rasool, M. S. A., Ali, S. M., & Rahman, R. A. (2015). *Efficiency of Islamic Institutions: Empirical Evidence of Zakat Organizations Performance in Malaysia*. Journal of Economics, Business and Management, 3(2), 282–286.
- Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Peraturan Bupati nomor 80 tahun 2016 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi
- Menyeluruh bagi Karanganyar. , (2016). Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. , (2004). Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. , (2015). Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. , (1999). Indonesia.
- Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar. (2016). Laporan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Kabupaten Karanganyar tahun 2016. Karanganyar.
- Steers, R. M. (1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*. Jakarta: Erlangga.
- Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: Grasindo.
- Taufiq, M., Kombaitan, B., & Putro, H. P. (2018). *CSR Suatu Refleksi*

Perencanaan Transaktif:

Perspektif Filsafat Ilmu Weber, M. (1968). *Economy and
Pengetahuan. Tataloka, 20(2), Society (Charles Sc). Glamcoe.
136–147.*